

BULETIN

PARLEMENTARIA



NOMOR 903/III/IV/2016



DPR SEGERA TINDAKLANJUTI LAPORAN BPK



KETUA DPR
TERIMA
PENGACARA
FAHRI HAMZAH



IURAN BPJS
TIDAK NAIK,
DPR APRESIASI
LANGKAH
PEMERINTAH



PEMERINTAH
HARUS BERUPAYA
LEBIH KERAS
SERAP PAJAK



DPR Segera Tindaklanjuti Laporan BPK

Pimpinan DPR menerima hasil audit BPK semester II tahun 2015

DPR akan segera menindaklanjuti laporan hasil audit BPK semester II tahun 2015. BPK menemukan 2.537 masalah berdampak finansial senilai Rp 9,87 triliun. Bila ada masalah hukum, DPR bisa meyerahkannya ke penegak hukum.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan hal tersebut di ruang kerjanya usai memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/4). Dari nilai Rp 9,87 triliun itu, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 710,91 miliar, berpotensi merugikan negara Rp 1,15 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 8 triliun.

"Setelah dilakukan pendalaman di komisi, kami akan menentukan langkah berikutnya. Jika ditemukan penyelewengan, bisa jadi kami lanjutkan ke

penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, atau ke KPK," papar Taufik. Laporan BPK tersebut, katanya, tentu memiliki akurasi data dan kekuatan hukum. Apalagi, ini menyangkut keuangan negara yang dikelola oleh kementerian dan lembaga.

Laporan BPK ini, sambung politisi PAN ini, bisa menjadi tolok ukur, baik bagi DPR maupun penegak hukum. Taufik juga mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah selama ini, hingga menimbulkan dampak finansial sampai Rp 9,87 triliun. "Harusnya lembaga negara bisa lebih transparan. Laporan BPK bisa dijadikan tolok ukur bagaimana sebuah lembaga mengelola keuangannya," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua BPK Harry Azhar di hadapan Rapat paripurna DPR mengungkapkan, pada semester II Tahun 2015, ada 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan yang terdiri atas 6.558 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 11,49 triliun dan 2.175 masalah kelemahan sistem pengendalian *intern* (SPI).

BPK juga telah memeriksa 704 objek pemeriksaan yang terdiri atas 92 objek pemerintah pusat, 571 objek pemerintah daerah dan BUMD, serta 41 objek BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, ada 35 objek pemeriksaan keuangan, 277 pemeriksaan kinerja, dan 392 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. ■

(mh), foto: And/ht



Ketua DPR: Kemerdekaan Palestina Harga Mati

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan komitmen seluruh negara Islam bahwa kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Kemerdekaan Palestina yang terus



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Ketua Asosiasi Parlemen untuk Al Quds

diperjuangkan adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan hanya kemerdekaan sebagai komoditas politik yang terjadi selama ini.

"Kemerdekaan Palestina adalah harga mati," kata Ade Komarudin, usai menerima delegasi Asosiasi Parlemen-Parlemen untuk Al Quds (the Assosiation Parliamentarians for Al Quds) yang dipimpin Ketua Syekh Hamid Al Ahmar, membicarakan masa depan dan kemerdekaan Palestina, di Gedung DPR, Senin (11/4).

Ade Komarudin menjelaskan masa depan dan kemerdekaan Palestina mendapatkan perhatian dari bangsa Indonesia. Termasuk diberbagai diplomasi parlemen selalu memperjuangkan kepentingan Palestina, karena itu merupakan komitmen menyangkut Palestina, bahwa DPR RI sangat mendukung Pemerintah untuk membuka Konsul Jenderal RI di Ramallah.

"Bagi bangsa Indonesia, masalah Palestina adalah masalah yang mendapatkan perhatian khusus dari eksekutif, legislatif dan rakyat Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Ade mengatakan Indonesia dalam forum apapun akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang benar-benar dikehendaki, yaitu kemerdekaan yang tidak terhalangi Israel sedikit pun.

Ketua Asosiasi Parlemen-Parlemen untuk Al Quds, Syekh Hamid Al Ahmar,

menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam memperjuangkan kemerdekaan Yerusalem dan Palestina, pertama yaitu menjadikan Yerusalem ada dihati umat islam. Kedua, menyatakan bahwa musuh kita yaitu zionis Israel. Ketiga, meyakini bahwa kita tidak akan membiarkan Yerusalem dan Palestina terus dijajah oleh Israel.

"Tentu kita tidak akan biarkan, dan akan terus berjuang kemerdekaan Yerusalem dan Palestina," tegasnya.

Syekh Hamid Al Ahmar optimis langkah yang akan diambil oleh Parlemen dan Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam membantu kemerdekaan bangsa Palestina.

"Kita berdoa bersama kepada Allah bisa bertemu dan berkumpul di Masjidil Aqsha, Yerusalem Palestina," tandasnya.

Organisasi ini berkantor sementara di Istanbul, yang telah ditetapkan kantor di Yerusalem, terbentuk 1 tahun yang lalu di Istanbul, yang terdiri lebih dari 150 anggota parlemen dari 20 negara Islam. Tujuan dibentuk ikatan parlemen ini untuk mendorong parlemen-parlemen negara Islam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.

Pada kesempatan tersebut, Ade Komarudin menyatakan akan datang atas undangan Konferensi yang diselenggarakan Asosiasi Parlemen-Parlemen untuk Al Quds di Istanbul pada tanggal 30 November 2016. ■

(as), foto : rb/hr.

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastiti, M.Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,
(DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Suratna, M.Si
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)
Ahyar Tibi, S.H
(Kasubag Media Analisis)
Insan Abdirrohman, S.H, M.Si
(Kasubag Media dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

SIRKULASI

Eko Murdiyanto

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

Email

penerbitandpr@gmail.com

(isi berita dan materi foto diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)



UMKM Miliki Potensi untuk Hasilkan Produk Ekspor

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi dan keunggulan kreativitas dalam menghasilkan produk-produk ekspor, sehingga ini juga menjadi upaya untuk penganeekaragaman produk ekspor Indonesia.

Hal ini dikatakan Taufik, saat dihubungi Parlemenaria melalui telepon, Kamis (7/4), terkait diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI oleh Pemerintah, pada pertengahan Maret lalu.

Sebagaimana diketahui, dalam paket ini, pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berorientasi ekspor. Dengan program ini, para pelaku UMKM yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, baik itu dengan mengekspor sendiri barangnya maupun menjualnya kepada perusahaan pengekspor, berhak mendapatkan KUR dengan bunga sembilan persen.

"Namun, upaya untuk mengekspor produk UMKM masih terkendala, terutama masalah pembiayaan, serta masalah dalam kapasitas UMKM yang menyangkut Sumber Daya Manusia, pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat," kata Taufik.

Untuk itu, politisi F-PAN ini meminta Pemerintah untuk memberikan stimulus kepada UMKM untuk meningkatkan ekspor nasional, daya saing produk ekspor



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

UMKM berbasis kerakyatan, hingga meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor.

Sementara terkait kebijakan mengenai sistem Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) untuk mempermudah proses bongkar muat barang di pelabuhan, Taufik berharap kebijakan ini dapat mempercepat pelayanan kegiatan impor atau ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan *dwelling time* melalui peningkatan efektifitas pengawasan melalui integrasi pengelolaan

risiko di antara Kementerian dan Lembaga terkait.

"Adanya perlakuan pelayanan yang berbeda-beda atas pengguna jasa yang sama di setiap Kementerian dan Lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan inefisiensi dalam kegiatan ekspor impor. Pengelolaan resiko pada Kementerian dan Lembaga juga belum dilakukan secara sistematis dan belum terintegrasi," nilai Taufik.

Untuk kebijakan Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), politisi asal dapil Jawa Tengah itu menilai, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah selama empat tahun belakangan, telah menyebabkan kegiatan *real estate* menurun sejak tahun 2014. Sementara sektor *real estate* merupakan salah satu sektor padat karya.

"Jumlah DIRE di dalam negeri sangat rendah yaitu hanya ada 1 DIRE yang diterbitkan sejak tahun 2012. Tidak menariknya DIRE di Indonesia disebabkan pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga," analisa Taufik.

Dan untuk kebijakan pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes), Taufik berharap hal ini dapat menjadi upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri. ■

(ef), foto: ik/hr.

Ketua DPR Terima Pengacara Fahri Hamzah

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Sekretaris Jendral DPR Winantuningtyastiti menerima kunjungan kuasa hukum Fahri Hamzah, Musjahid A. Latief di ruang kerja Ketua DPR, Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (11/04).

Kedatangan Tim Pengacara ini dalam rangka menyampaikan surat permohonan, agar tidak memproses pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu (PAW) serta Penggantian sebagai Pimpinan DPR RI atas nama Fahri Hamzah.

"Kedatangan kami bermaksud untuk

menyerahkan surat untuk Pak Ade Komarudin selaku Ketua DPR RI, kami juga meminta Pimpinan DPR untuk tidak memproses pemberhentian Pak Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR sebelum proses Hukum di Pengadilan selesai. Kami meminta sepanjang belum ada keputusan



Ketua DPR Santuni Keluarga Irma Bule

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ade Komarudin (Akom) memberikan santunan kepada keluarga penyanyi dangdut Irma Bule yang meninggal dunia karena dipatuk Ular Cobra saat manggung. Irma Bule memang dikenal sebagai penyanyi dangdut dengan atraksi menari dengan ular.

Santunan ini diserahkan langsung oleh Staf Ahli Ade Komarudin, Eko Surya Effendi kepada keluarga mendiang Irma Bule. Penyerahan santunan itu juga disaksikan langsung oleh suami Irma Bule, Andri dan Kepala Desa Dawuan Timur di rumah Irmawati (nama asli dari Irma Bule) di Dusun Pawarengan RT 02, RW 01 Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Minggu (10/4).

"Pak Akom menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Irma Bule dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ucap Eko.

Dia juga menyampaikan, bahwa Ketua DPR Ade Komarudin yang akrab dipanggil Akom tetap berkomitmen untuk

memperjuangkan nasib masyarakat Kabupaten Karawang dan daerah pemilihannya secara keseluruhan di tingkat nasional.



Santunan keluarga Irma Bule dari Ketua DPR Ade Komarudin

"Beliau adalah putra asli Jawa barat, jadi akan terus berjuang di tingkat nasional untuk kepentingan masyarakat di Jawa barat. Sekarang sudah dibuktikan dengan gebrakan-gebrakannya sebagai Ketua DPR," katanya.

"Semestinya kita bangga memiliki putra daerah terbaik seperti Pak Akom," tegas dia.

Selain itu, Eko menyampaikan permohonan maaf dari Akom karena tidak bisa menyerahkan santunan itu secara

langsung. Akom katanya, sedang menjalankan tugas di daerah lain selaku Ketua DPR RI.

"Pak Akom ingin membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakat di Dapilnya, walaupun dalam keadaan yang sangat sibuk," kata Eko.

Irma Bule adalah penyanyi dangdut asal Karawang yang tewas dipatuk Ular Cobra, Minggu, 3 April 2016 lalu. Wanita berusia 29 tahun itu memang dikenal sebagai penyanyi dangdut dengan atraksi menari dengan ular.

Tapi nahas, saat berjoget ia tidak sengaja menginjak ekor ular cobra yang diajak manggung. Ular

yang sangat berbisa itu mematuk pahanya. Dia pun sempat terjatuh dan terkulai.

Sang pawang ular minta Irma Bule tidak melanjutkan pertunjukannya. Namun isteri seorang buruh pabrik itu menolak diobati dan tetap bernyanyi dan bergoyang selama 45 menit.

Setelah rehat barulah, Irma Bule tersungkur pingsan dan dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. ■

(imp), fotodok pr/od.



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima surat permohonan dari kuasa hukum Fahri Hamzah

tetap, Pimpinan DPR tidak melakukan tindakan terhadap status Fahri di DPR " kata Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas Fahri Hamzah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan akan langsung memproses dalam Rapat Pimpinan. " Kami akan mengadakan Rapat

Pimpinan dan ini akan menjadi bahan utama dari rapat itu," ujar Akom.

"Keputusan dari permohonan ini tergantung hasil Rapat Pimpinan besok," tambah Akom.

Senada dengan Akom, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, kasus pemecatan Fahri perlu mendapat perhatian serius. "Ini menjadikan prioritas karena pak Fahri Hamzah salah satu Pimpinan DPR, kita akan proses sesuai UU MD3," tegasnya. ■

(rnm,mp), foto: jk/hr.



Fadli Zon Dukung Kegiatan OIC Youth Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kedatangan delegasi OIC (Organization of Islamic Cooperation) Youth Indonesia, yang diwakili oleh Ade Budiman selaku Sekjen, guna meminta dukungan DPR agar dapat memberikan *support* dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh OIC Youth Indonesia.

"Kita mendukung segala upaya yang dilakukan oleh kalangan muda yang tergabung dalam OIC Youth Indonesia, karena mereka mempunyai suatu konferensi yang dihadiri juga oleh negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Turki. Mudah-mudahan kegiatan tersebut membawa hasil yang baik, terutama hal-hal yang menjadi konsen Indonesia di OKI, yakni soal kemerdekaan Palestina," ujar Fadli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Politisi F-Gerindra itu juga

mengatakan bahwa DPR juga mendukung upaya yang saat ini dilakukan Pemerintah untuk membuka semacam konsultasi kehormatan di Ramalah.

"Kehadiran 11 orang perwakilan pemuda Indonesia yang tergabung dalam OIC Youth Indonesia ini untuk membuat suatu dukungan yang konkrit, bahwa ini bukan hanya menjadi masalah di kalangan eksekutif atau Parlemen, tetapi organisasi pemuda OKI juga ikut eksis mendukung," jelasnya.

Terkait masalah etnis Rohingya, Indonesia telah mempunyai sikap yang jelas, yaitu tetap mendorong dengan memberi dukungan kepada etnis Rohingya yang merasa terusir, bahkan yang datang



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berdialog dengan delegasi OIC Youth Indonesia

ke Indonesia telah ditampung dengan baik di Aceh.

"Ini merupakan suatu komitmen kemanusiaan, bukan saja karena mereka itu muslim, tetapi juga karena sebagai bentuk komitmen kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia," tandas Fadli. ■

(dep.mp). Foto : andi/hr.

Komisi III Terima Masukan Komnas HAM Terkait Kematian Siyono



Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menerima dokumen dari Komnas Ham

Ada tiga poin penting yang ingin diketahui Komisi III DPR RI terkait dengan tewasnya Siyono, salah seorang warga Klaten. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa saat membuka rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), PP Muhammadiyah, dan KontraS di ruang rapat

Komisi III, Senayan Jakarta, Selasa (12/4).

"Disini ada tiga poin penting yang ingin diketahui, apakah betul Siyono seorang teroris sehingga harus ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror. Apakah betul Siyono tewas dalam sebuah perkelahian karena melakukan perlawanan saat ditangkap dan diperiksa Densus 88 ? Dan apakah uang yang diberikan Densus 88 kepada keluarga Siyono sebagai tanggung jawab dan tindakan Densus 88 saat penanganan Siyono sebagai terduga teroris," ungkap Desmond.

Menanggapi hal itu, Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan



pertama apakah Siyono merupakan seorang teroris atau tidak, hal itu hanya bisa dijawab oleh Densus 88. Dalam hal ini pihaknya hanya akan memaparkan dari sisi Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil forensik yang telah dilakukan oleh 10 dokter, termasuk dokter dari Muhammadiyah dan satu dokter forensik dari Polda Jawa Tengah.

Diungkapkan Imdadun, bahwa berdasarkan hasil forensik Siyono meninggal bukan karena kelelahan setelah melakukan perlawanan dengan Densus 88 sebagai mana yang dikatakan pihak kepolisian. Melainkan harena hantaman benda tumpul yang akhirnya membuat tulang rusuknya patah.

"Kematian Siyono akibat benda tumpul yang terjadi pada rongga dada.

Patah tulang dibagian kiri, ada lima ke dalam. Tulang dada dalam kondisi patah yang kemudian menusuk kearah jantung. Dari hasil *autopsy* juga ditemukan luka di bagian kepala. Disini Tim dokter tidak menemukan ada indikasi Siyono melakukan perlawanan," jelas Imdadun. Dengan demikian lanjutnya, Komnas HAM meyakini bahwa dalam kasus kematian Siyono telah terjadi pelanggaran HAM saat Siyono masih hidup.

Sementara itu Politisi dari Fraksi Partai Gerinda, Desmond mengatakan apa yang dituntut keluarga korban ini tentu bukan semata agar kasus serupa tidak terulang lagi, ataupun kasus ini berakhir hanya pada sidang etik. Hal ini sejatinya sebuah tragedi nasional sebagai

wajah penegakan hukum di Indonesia. Ini merupakan kesalahan pemerintah yang tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat. Harus ada sanksi atau hukuman terhadap para pelaku jika hal itu terbukti sebuah pelanggaran HAM.

"Dengan begitu kami akan mengagendakan pertemuan dengan BNPT (Badan nasional penanggulangan teroris) Rabu 13 April. Disusul Rabu depannya dengan Kapolri beserta jajarannya. Jika memang kemudian terdapat perbedaan keterangan antara Kapolri dan Komnas HAM, kami akan membentuk Panja guna menyelidiki kebenaran yang ada," pungkas Desmond. ■

(ayu), Foto: And/hr.

DPR Sahkan Tata Cara Penyusunan Prolegnas

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan secara aklamasi menyetujui Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Rapat Paripurna tersebut, seluruh Fraksi DPR RI menyampaikannya disertai penyerahan pandangan mini fraksi secara tertulis.

"Apakah rancangan Peraturan DPR tentang Tata

Cara Penyusunan Prolegnas dapat disetujui?" tanya Taufik kepada peserta Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/04).

"Setuju..." jawab anggota dewan, dan palu pun diketuk tanda persetujuan.

Dalam Rapat Paipurna yang dipimpin Taufik Kurniawan didampingi Fahri Hamzah dan Fadli Zon, diwarnai beberapa interupsi terkait Pembahasan RUU Tax Amnesty yang masuk dalam daftar Prioritas Prolegnas 2016. Menurut



Pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna

beberapa anggota dewan, pembahasan Tax Amnesty yang diserahkan ke Komisi XI berdasarkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) sehari sebelumnya dianggap kurang memenuhi syarat lantaran hanya dihadiri oleh satu Pimpinan DPR.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas meminta agar keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dipimpin Ketua DPR Ade Komarudin untuk dibatalkan. "Keinginan besar fraksi dibentuk pansus tapi jadi heran kemarin dilakukan bamus

dan langsung ditetapkan pembahasannya di Komisi XI," ungkap politisi Gerindra itu.

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan RUU Tax Amnesty ini sudah menjadi persetujuan bersama DPR dan pemerintah. Menurutnya, pembahasan RUU Tax Amnesty sebaiknya segera dilakukan. Namun, bila ada keberatan atau masukan bisa dibicarakan dalam pembahasan RUU tersebut guna mencari jalan keluar yang terbaik. Sebab, saat ini tax ratio di Indonesia cukup rendah.

"Kalau kita tidak ingin bahas dalam 60 hari, apa yang akan kita bahas? Apa enggak melanggar Undang-Undang? karena ini sudah ada surpresnya," tegas Misbakhun.

Disamping itu, Taufik Kurniawan mengatakan masalah RUU Tax Amnesty ini sudah dibahas dalam rapat Pimpinan Selasa pagi ini bersama Biro Hukum Kesetjeraan DPR. "Intinya, pembahasan Tax Amnesty ini tidak bisa dipisahkan dalam rapat Pimpinan DPR," kata Taufik. ■

(ann.mp), Foto: jk/hr.



Perfilman Alami Persoalan, Komisi X Serap Masukan Ke Jatim

Komisi X DPR RI menilai, perfilman nasional mengalami berbagai persoalan, diantaranya maraknya ekspansi film luar yang menguasai perfilman Indonesia. Maka dari itu, Komisi X DPR mengadakan penelusuran langsung di lapangan mulai dari proses produksi, distribusi, eksekusi, dan pelaksanaan yang melibatkan dunia perfilman nasional.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almayahri (F-PKS) saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR, saat pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi, dan kalangan insan perfilman Jawa Timur, di Ruang Rapat Kertanegara, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (08/4).

"Kami ingin mendapat gambaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus ingin mendengarkan problematika dan kendala tentang perfilman ini dari pemangku kepentingan lainnya," kata Kharis.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, film merupakan karya seni budaya yang punya peran strategis yang ujungnya mampu meningkatkan ketahanan bangsa. Negara bertanggung jawab dalam memajukan perfilman nasional.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah. Ia menekankan, pihaknya telah merangkum berbagai permasalahan tentang perfilman dari berbagai daerah. Termasuk dari insan perfilman yang telah diundang ke Gedung DPR RI, Senayan.

"Jadi memang di Komisi X ini sedang

merumuskan, bahwa kami tidak ingin salah dalam memberikan masukan kepada pemerintah menyangkut perfilman nasional ini," jelas politisi F-PAN itu.

Anang berharap, dengan adanya UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman,

didengar oleh Tim Panja untuk kemudian dapat dicarikan solusinya," kata Sukardi.

Pemprov Jatim, masih kata Sukardi, juga meminta Pemerintah Pusat segera mengesahkan peraturan terkait perfilman. Dengan begitu, Pemerintah Daerah bisa segera mengatur kebijakan terkait. Dan meminta insan perfilman menghargai kearifan lokal, diantaranya terkait keberadaan bioskop.

"Di Jatim, ada beberapa wilayah dimana tokoh masyarakatnya seperti kyai, melarang adanya bioskop. Itu harus kita hargai sebagai bentuk kearifan lokal," imbuh Sukardi.

Dalam kesempatan yang sama, Seniman Perfilman Jawa Timur Imung Mulyanto

mengatakan, paradigma tentang perfilman harus dibuka, agar tetap berjalan dan tidak mati. Dengan perkembangan teknologi, ia berharap UU No 33 tahun 2009 dapat dipublikasikan dan tersosialisasi dengan baik.

"Kalau seniman itu nafsunya tidak bisa ditahan, terus berkarya dan kalau anak muda itu tidak peduli ada Perda ada UU yang berlaku. Mereka terus jalan," kata Imung.

Selama pertemuan, terungkap beberapa masalah perfilman. Diantaranya, sedikitnya jumlah film nasional serta film impor yang mulai menguasai pasar Indonesia. Kunjungan kerja ini diikuti oleh beberapa Anggota Komisi X DPR, diantaranya Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Asdi Narang (F-PDI Perjuangan) Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Sri Meliyana (F-Gerindra), dan Wayan Koster (F-PDI Perjuangan). ■



Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah dan Asdi Narang

seharusnya dapat mengakomodir berbagai permasalahan di lapangan. Termasuk agar Provinsi Jatim dapat memiliki industri film sendiri yang kuat.

"Komisi X DPR dengan cepat ingin bisa ikut menyelesaikan permasalahan ini dengan sigap. Namun tiba-tiba muncul Daftar Negatif Investasi untuk perfilman, sehingga ini menjadi permasalahan baru. Kita juga ingin tahu, teman-teman yang ada di daerah apakah setuju atau tidak terkait hal itu," imbuh politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi mengatakan, seni budaya merupakan akar dari identitas bangsa yang harus dipertahankan. Film, sebagai bagian dari seni dan budaya, dapat menjadi media komunikasi massa yang mengandung pendidikan, sejarah dan pengetahuan.

"Film terutama tentang sejarah dan budaya, harus dikembangkan dengan baik. Melalui pertemuan ini, saya harap kendala perfilman Jatim dapat segera



Paripurna DPR Sahkan Keanggotaan Pansus Revisi RUU Pemberantasan Terorisme

Rapat Paripurna DPR Selasa (12/4) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berhasil mengesahkan 30 anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Persetujuan dicapai menyusul pertanyaan Pimpinan Rapat "Apakah susunan dan keanggotaan Pansus revisi UU Teorisme bisa disetujui?," yang langsung dijawab serentak "setuju dan langsung ketuk palu tanda pengesahan.

Ketigapuluh nama anggota Pansus revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terbagi sesuai komposisi keanggotaan fraksi di DPR. Dimana FPD Perjuangan menempatkan 6 anggota, FPG



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin sidang paripurna

5 anggota, F Gerindra 4, dan FPD 3 anggota, FPAN, FPKB, FPKS, dan FPP masing-masing 2 anggota. F Nasdem dua anggota dan F Hanura seorang wakil.

Selengkapnya, Fraksi PDI Perjuangan berjumlah 6 anggota yakni TB Hasanuddin, Bambang Wuryanto, Trimedya Panjaitan, Irene Yusiana Rosa Putri, Risa Mariska,

dan Achmad Basarah.

Fraksi Partai Golkar menugaskan 5 anggotanya terdiri, Bobby Rizaldi, Fayakhun Andriadi, Dave Akbarshah, Ahmad Zaky Siradj, dan Saiful Bahri. Fraksi Partai Gerindra menugaskan 4 anggotanya yaitu Martin Hutabarat, Ahmad Muzani, Iwan Kurniawan, dan Wenny Warouw.

Fraksi Partai Demokrat terdiri 3 anggota yaitu Sjarifuddin Hasan, Benny K Harman, dan Darizal Basir. Sedangkan Fraksi PAN tiga anggota yakni Mulfachri Harahap, Hanafi Rais, dan Muslim Ayub.

Fraksi PKB menempatkan dua anggota yakni Syaiful Bahri Ansyori, dan Muhammad Toha. FPKS Sukamta dan Nasir Djamil serta FPP Arsul Sani, dan Achmad Dimiyati Natakusumah serta Fraksi Partai Nasdem: Supiadin Aries Saputra dan Akbar Faizal. Fraksi Hanura: Syarifuddin Sudding. ■

(ayu.mp), foto : iw/hr.

Iuran BPJS Tidak Naik, DPR Apresiasi Langkah Pemerintah

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah yang tidak menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan peserta mandiri kelas 3 seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2016.

"Artinya ini merupakan *win-win solution*, karena di dalam kesimpulan Komisi IX saat raker dengan Menkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, salah satunya Komisi IX mempertanyakan mengenai peserta mandiri kelas 3 pada pasal 16 f," ujar Politisi Jabar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (07/4).

Namun lanjut Dede yang juga politisi

partai Demokrat ini mengatakan, DPR akan melihat setelah berjalan Perpres terlebih dahulu dan jika ada peraturan yang memberatkan masyarakat maka komisi IX akan mengevaluasi.

"Dalam kurun waktu berjalannya peraturan ini, kita bisa melakukan rekomendasi-rekomendasi, karena kita tidak dapat mencabut Perpres tersebut, yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi, apalagi Panja BPJS Kesehatan belum selesai," ungkap Dede.

Sebelumnya, sempat diumumkan bahwa iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri mengalami penyesuaian. Penyesuaian iuran yang sudah berlaku efektif tanggal 1 April 2016 sesuai dengan

Perpres nomor 19/2016 sebagai berikut, Ruang perawatan kelas I, menjadi Rp 80.000, kelas II menjadi Rp 51.000 dan kelas III tetap Rp 25.500 tidak mengalami perubahan. Adapun perubahan ini dikhususkan bagi kategori peserta

pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja. ■



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf

(mm), foto:od/hr.



Banyak UU Yang Tidak Diimplementasikan

Evaluasi dan pemantauan terhadap Undang-undang merupakan tugas baru yang diamanatkan dalam UU MD3 kepada Badan Legislasi (Baleg). Ini menjadi penting karena ada sebuah Undang-undang (UU) yang belum dijalankan oleh DPR selaku badan legislasi.

"Hal ini juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang mengatakan bahwa banyak Undang-Undang (UU) setelah diundangkan ternyata tidak diimplementasikan termasuk sanksi-sanksi yang telah diamanatkan oleh UU," ujar Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).



Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo

Menyikapi hal ini Firman mengatakan, ada tiga Undang-undang (UU) yang penting untuk di evaluasi, pertama mengenai UU Pangan karena hampir setiap tahun bangsa ini dihebohkan dengan persoalan-persoalan import bahan pokok, kemudian kita dihebohkan lagi dengan adanya persoalan-persoalan tidak terserap produksi nasional.

Selain UU Pangan, yang menjadi sorotan adalah UU mengenai Narkoba yang perlu di evaluasi karena dianggap masih lemah oleh penegak hukum. Bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai saat ini di Indonesia statusnya sudah 'darurat narkoba'.

"Aparat penegak hukum mengatakan UU nya masih lemah tetapi, sampai sekarang tidak pernah ada inisiatif dari pemerintah untuk merevisi. Oleh karena itu kami menginisiatif mengundang aparatatur hukum dan instansi terkait untuk menanyakan dimana letak

kelemahannya, apa yang harus diubah dan harus seperti apa, dan nanti baru kita susun mengenai draf revisi UU nya," tegasnya.

Selanjutnya, Undang-undang yang perlu direvisi mengenai masalah kebakaran hutan, karena Undang-undang no 41 tentang Kehutanan dirasa masih lemah terhadap pelaku pembakaran hutan, sanksi yang diberikan sifatnya hanya sanksi administrasi. Apalagi isu kebakaran hutan sudah menjadi isu politik sampai ke tingkat internasional bahkan sekarang ini sudah masuk ranah yang tidak sehat.

"Adapun UU no 18 tentang pencegahan kawasan hutan, sanksi yang sangat mengikat dan sampai kepada penyitaan aset bagi inisiator kerusakan hutan akibat penambangan, pembakaran liar. Dalam UU ini sayangnya tidak ada salah satu pasal yang mengatur tentang kerusakan hutan akibat kebakaran," kata Firman

Perlu dibuat sebuah regulasi yang betul-betul dibutuhkan oleh semua pihak. Tiga UU ini merupakan satu langkah awal kita untuk melakukan evaluasi dan pemantauan UU sehingga kedepan kita mempunyai UU yang lebih berkualitas dan lebih berbobot dan konsisten. ■

(mm,mp), fotojay/hr.

Revisi UU 39/2004 Titikberatkan pada Perlindungan

Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, masih dalam pembahasan dengan pemerintah termasuk BNP2TKI. RUU ini menitikberatkan kepada perlindungan pekerja di luar negeri termasuk yang tidak berdokumen.

"RUU ini sebagai inisiatif DPR, terdapat 907 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang dibahas bersama Kemenaker, Kemendagri, Kemenlu, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, BNP2TKI dan lain-lain untuk satukan visi perlindungan bagi pekerja migran ini," tegas anggota Komisi IX Okky

Asokawaty bersama Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, dan Direktur Eksekutif *Migrant Care* Anis Hidayah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/4)

Politisi Fraksi PPP mengatakan, dalam pembahasan RUU ini, ada tiga hal yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah. Pertama mengenai judul menjadi "Perlindungan Pekerja di Luar Negeri". Kedua, tentang dibentuknya sebuah badan di luar kementerian, dan ketiga memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap WNI di luar negeri.

"Baik yang dikirim oleh swasta PPTKIS



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawaty dalam acara Forum Legislasi DPR

negeri tetapi tidak mengubah kewarganegaraannya), pekerja yang dikirim oleh perusahaan yang membuka cabang di luar negeri," ujarnya.

Selain itu RUU ini juga akan memaksimalkan peran Pemda, agar pekerja migran itu menjadi subjek dan bukan objek. Karena itu harus ada *time frame*.

Sementara menurut Hermono, RUU ini harus jelas konstruksi hukum, kebijakan turunan yang dilihat dari perseptif

perlindungan, dan pemerintah perlu meningkatkan kompetensi dalam rekrutmen TKI, yang mayoritas lulusan sekolah dasar.

Selanjutnya Anis Hidayah mengingatkan jika pada 12 April 2012 DPR mengesahkan UU Ketenagakerjaan, dan RUU ini ibarat memperbaiki rumah yang rusak dan bukan saja memperbaiki genteng bocor. Melainkan fondasi rumah harus kuat, sehingga dapat melindungi penghuninya sesuai HAM dimana negara harus hadir di dalamnya. Anis menambahkan di era digital seperti ini, seharusnya sudah bisa memberlakukan *e-migration* yang diatur secara *online*, sehingga lebih efektif. ■

(rnm/mp), foto : and/hr.

(swasta), pekerja yang dikirim oleh pemerintah, pekerja perorangan (melamar sendiri), lokal staf (WNI yang hidup di luar

Komisi V Upayakan Pembangunan Toraja Lebih Maksimal

Anggota Komisi V Hamka B Kady (F-Golkar) mengatakan keprihatinannya terhadap pembangunan yang terjadi di Tana Toraja dan Toraja Utara. Hal itu disampaikan saat Komisi V melakukan audiensi dengan Bupati Tana Toraja dan Bupati Toraja Utara pada Selasa, (12/04) di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Saya ingin menyampaikan bahwa sangat miris melihat pembangunan di dua kabupaten ini. Oleh karenanya saya sangat bangga dan gembira atas pertemuan ini sehingga menjadi catatan," ujarnya

Terkait pembangunan Bandara, Hamka menuturkan akan mendalami masalah anggaran dengan Menhub. Namun sebelumnya, dirinya mengakui bahwa anggaran Kemenhub tidak cukup untuk mengcover pembangunan Bandara, info itu didapatkan saat dirinya berbicara dengan Menhub.

"Terkait pembangunan Bandara, kemarin saya ngobrol dengan Menteri Perhubungan. Memang ada masalah yang perlu ditelusuri. Karena memang anggaran di Kemenhub, tidak sebesar yang diinginkan dalam pembangunan itu," terang Hamka.

"Soal Bandara katanya *hands up* dulu dan akan dibicarakan tersendiri. Kalau perlu Komisi V mengirim surat ke presiden. Karena ini adalah tujuan wisata nasional. Karena anggaran yang ada di Kemenhub sedikit dan tak mampu mengcover apabila kita menargetkan itu," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahrum Daido (F-Demokrat) juga mendorong Pemda Toraja untuk melakukan pendekatan kepada Kementerian. Hal ini dikarenakan ada dugaan komunikasi yang *miss* antara kedua lembaga tersebut. Dirinya juga akan meninjau secara langsung pembangunan di Toraja dalam waktu dekat. "Saya heran kenapa Pemda tidak ada pendekatan kepada Kementerian. Terkait pembangunan kawasan pariwisata di Tana Toraja, dalam waktu dekat saya akan meninjau kesana," ujarnya.

Terkait hal itu, Hamka mengatakan tidak perlu mempersoalkan hal yang terjadi di belakang, penting untuk lebih mengutamakan persoalan ke depan

dalam rangka penyelesaian. "Memang ada *miss* tapi tak usah dipersoalkan, masih ada banyak jalan ke rumah. Tak usah lihat kebelakang, tapi harus lihat ke depan apa pagu anggaran yang akan digunakan," jelasnya.

"Persoalan yang dulu tidak terkomunikasikan, mari untuk segera dikomunikasikan. Karena saya yakin bahwa Tana Toraja adalah kebanggaan bagi Indonesia," pungkas Hamka. ■

(hs/mp), foto : od/hr.



Anggota Komisi V DPR Hamka B Kady



Komisi II Dorong LVRI Dapatkan Kembali Haknya

Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji (F-PDI Perjuangan) meminta penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjelaskan kasus sengketa tanah Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Mandailing.

Hal itu disampaikan saat Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian ATR/BPN, Ketua DPC LVRI Jawa Barat, Ketua LVRI DKI Jakarta, Direktur PT Pertiwi Lestari, Kepala Desa



Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji

Margakarya dan Masyarakat Adat Mandailing Natal di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (12/04).

Oleh karenanya, Sirmadji meminta untuk perlunya mendengarkan penjelasan dari BPN terkait hal ini. "Saya ingin menegaskan bahwa BPN perlu memberikan penjelasan," ujarnya.

Hal ini merujuk pada upayanya agar LVRI bisa mendapatkan kembali haknya secara legal. "Saya ingin, bagaimana caranya agar LVRI bisa segera mendapatkan haknya secara legal dan tersertifikasi. Kepala BPN itu perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan

memfollow up atas eksekusi yang tuntas

sehingga LVRI jabar bisa memiliki haknya,"

papar Sirmadji.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria (F-Gerindra) yang juga selaku ketua rapat mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN harus menghormati dan melaksanakan putusan MA Nomor 120/K/TUN/20/2015 tanggal 23 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN melalui Kepala Kanwil Jawa Barat untuk melanjutkan proses pengukuran dengan memohon bantuan pengamanan dari Polres Karawang dengan melalui surat resmi.

Untuk menyelesaikan itu, Kementerian ATR/BPN diberikan waktu selama 4 bulan. "Kementerian ATR/BPN akan menyelesaikan proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat paling lambat empat bulan," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria.

Sebagaimana diketahui, hak kepemilikan atas tanah seluas 80 hektar yang terletak di Desa Margakarya, Teluk Jembe, Karawang berasal dari tanah negara yang merupakan pemberian kepada organisasi kemasyarakatan eks pejuang Jawa Barat. ■

(hs.mp), foto: rab/hr.

Dewan Minta Menteri Lingkungan Hidup Gunakan Kewenangannya

Terkait kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Komisi VII DPR RI, Senin (11/4) menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya dan jajarannya. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu.

Dalam rapat tersebut, Komisi VII minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya untuk menggunakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap

ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah (pemda) (Pemerintah Daerah DKI Jakarta) sebagaimana diatur didalam Pasal 73 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Komisi VII DPR RI juga minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan studi kelayakan yang komprehensif dan

pengecekan lapangan terhadap kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan *review* atas ketentuan yang terkait atas hal tersebut untuk disampaikan ke Komisi VII DPR RI paling lambat 18 April 2015," kata Gus Irawan saat membacakan kesimpulan rapat tersebut, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Komisi VII akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan



Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu

Kehutanan RI dengan menghadirkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Banten dan Gubernur Provinsi Jawa Barat pada 20 April 2016.

Sementara itu, usai rapat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan akan mengecek regulasi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ia juga memastikan bakal memeriksa kembali otoritas, prosedur, terminologi, serta anggapan di balik

megaprojek tersebut.

Menurutnya, pihaknya juga ingin melihat pembahasan Perda dan Tata Ruang atau zonasi proyek reklamasi itu dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI. Hal itu untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah prosedur desentralisasi.

Langkah berikutnya yang bakal dilakukan ialah pemeriksaan adanya indikasi yang merujuk Pasal 73 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. ■

(sc), foto: jk/hr.

Legislator Berharap Pembahasan BPIH Selesai Bulan Ini

Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim menegaskan, sepulang Tim Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII dari kunjungan ke Mekkah terkait dengan regulasi dan besaran ketetapan BPIH, biasanya dalam tempo kurang lebih seminggu itu sudah selesai pembahasan di Komisi. Selanjutnya digelar raker dengan Kemenag untuk penetapan BPIH.

"Jadi hitung-hitungan saya sebelum tanggal 20 April sudah keluar sehingga berikutnya saat DPR reses akhir bulan April sudah di eksekutif. Seberapa cepat pihak eksekutif dalam hal ini Kementerian Agama dan Presiden menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keppres BPIH 2016," katanya saat dihubungi Parle, Selasa (12/4) di Jakarta.

Dengan tegas politisi PPP ini mengatakan, sungguh sangat keliru kalau ada sebagian orang mempertanyakan Komisi VIII memperlambat penentuan BPIH. " Itu keliru sekali, artinya operasionalisasi penyelenggaraan haji itu berdasarkan Keppres. Diharapkan pembahasan BPIH selesai Minggu III April ini berikutnya keluar rekomendasi Komisi VIII kepada pemerintah," jelas dia.

Menurutnya, dalam pembahasan BPIH kali ini ada tiga situasi yang berbeda.

Pertama laporan keuangan penyelenggaraan haji 2015 yang belum *clear*. Kedua, proses BPIH 2016 tetap berjalan karena ada solusi dibentuknya Panitia Kerja (panja) dan yang ketiga melibatkan media dan masyarakat dan seolah-olah memojokkan DPR.

"Dengan tegas saya membantah itu tidak masuk akal. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami, karena tahun 2015 lalu, Keppres BPIH itu keluar pada akhir bulan April," ia menambahkan.

Lebih lanjut Mustaqim mengatakan, kalau pemerintah konsekuen menggunakan tahun hijriah dalam menentukan kalender haji maka seharusnya administrasi pun mencantumkan juga tanggal hijriah. Sehingga bisa juga dijadikan tolak ukur Komisi VIII dalam menyesuaikan keputusan. Ia ingat persis karena justru yang diutamakan adalah tanggal nasional, sehingga sangat yakin kalau akhir April sudah *clear*.



Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim

"Kawan-kawan Komisi VIII minggu lalu sudah balik dari Mekkah dan dilanjutkan penyusunan laporan," katanya.

Sehingga pada minggu berikutnya kemungkinan besar memang melakukan raker untuk menentukan hitungan dan pada tanggal 20 itu sudah *clear* dan mengembalikan kepada pemerintah.

"Waktu itu saya masih ingat sekali rapat bulan Februari akhir, kemudian awal Maret dikirim ke Pemerintah. Ternyata prosesnya itu baru akhir April. Artinya kurang lebih sebulan sampai satu setengah bulan proses keluarnya Keppres," ungkap Mustaqim menambahkan.

(rief,mp) foto: arf/hr.



Legislator Usulkan Pengadaan Genset untuk Pelaksanaan UNBK

Anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana mengusulkan pengadaan genset bersamaan dengan unit komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini sebagai antisipasi terjadinya pemadaman listrik selama berlangsung UNBK.

"Walaupun sudah ada kerjasama dengan PLN, dan menjamin tidak ada pemadaman listrik, kami mengusulkan pengadaan genset dimasukkan dalam pengadaan komputer, dari Pemerintah Pusat," kata Laila, usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Pasalnya, lanjut Laila, masih ada kemungkinan terjadinya pemadaman listrik. Dikhawatirkan, jika hal itu sampai terjadi dapat mengganggu konsentrasi peserta UN. Selain itu, sewa genset yang mahal, menjadikan alasan sebaiknya pengadaan genset digabung bersama dengan pengadaan komputer.

"Untuk mem-back up pelaksanaan UNBK, seluruh keuangan sekolah tergerus. Jika dalam sehari UNBK ada tiga kali shift,

sehingga membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk konsumsi, sewa genset yang mencapai Rp 1 juta per hari, dan lain sebagainya," papar Laila.

Politisi F-PAN ini menilai, jika genset sudah tersedia di sekolah, sekolah tidak perlu memikirkan harus menyewa genset, dan setidaknya sebagian masalah antisipasi pemadaman listrik sudah selesai.

Laila juga mencatat, masih ada permasalahan di kendala server, walaupun itu kasuistik di beberapa sekolah, tidak terjadi di seluruh sekolah yang mengadakan UNBK. Tingkat kebocoran UNBK pun dinilai nihil.

"Pelaksanaan UN tahun ini lancar, tapi belum sempurna. Pelaksanaan UNBK tahun ini lebih rapih dibanding tahun lalu. Kami harapkan kepada Pemerintah agar pengadaan komputer lebih diperhatikan," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati (F-PDI Perjuangan) mengingatkan, pelaksanaan UNBK jangan menjadi perang gengsi antar sekolah. Ia khawatir, karena

gengsi mengadakan UNBK, akhirnya sekolah memaksakan untuk menyiapkan infrastruktur UNBK, tanpa mempertimbangkan dana yang dimiliki.

"Mereka (sekolah, - red) berupaya untuk mengadakan UNBK, dengan tidak memperhitungkan kemampuan wali murid atau kemampuan Pemerintah Daerahnya. Ini yang kita agak khawatir, jangan-jangan pemaksaan ini akan membebani sektor pendidikan kita," khawatir politisi asal dapil DI Yogyakarta itu. ■

(sf), foto: azka/hr.



Anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana

Komisi XI Akan Bahas Dua RUU

Komisi XI DPR RI berencana akan membahas dua rancangan undang-undang (RUU) pada masa persidangan mendatang. Kedua RUU itu adalah RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan RUU Perbankan.

Setelah sukses merumuskan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) beberapa waktu lalu, Komisi XI kembali mengagendakan pembahasa dua RUU lagi. Dua RUU itu dipandang penting untuk mengatur sistem keuangan. Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menyampaikan hal tersebut pada rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Senin (11/4).

"Keputusan rapat internal Komisi XI DPR RI memutuskan dalam masa sidang sekarang kita akan membahasa RUU PNBP



Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno

dan RUU Perbankan. Kami mohon kesiapan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan diri, karena RUU PNBP ini dari Kementerian Keuangan. Kami mohon disiapkan betul," jelas Soepriyatno saat

membacakan surat-surat resmi dan penting yang masuk ke Komisi XI.

Pada bagian lain, Soepriyatno juga membacakan surat keputusan hasil rapat internal Pimpinan DPR RI, 4 April 2016 lalu, soal BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi XI. Dalam surat tersebut dijelaskan, Rapat Pimpinan DPR RI menyetujui soal penyertaan modal negara, privatisasi, dan kinerja keuangan BUMN menjadi sektor yang harus melibatkan Komisi XI dalam setiap pembahasannya.

Sebelumnya, semua pembahasan menyangkut BUMN menjadi otoritas Komisi VI DPR. Kini, seiring dengan keluarnya keputusan Pimpinan DPR tersebut, pembahasan menyangkut tiga sektor BUMN itu, akan selalu melibatkan dua komisi sekaligus, yaitu Komisi VI dan Komisi XI. ■

(mh), foto: arif/hr.



Komisi VI Tagih Progres Kinerja Bappebti

Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Bappebti Kementerian Perdagangan, dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Al-Fauzi (F-Hanura). Dalam forum ini anggota Komisi VI Nasril Bahar mengevaluasi dan menagih janji kemajuan kinerja Bappebti.

"Dalam rapat ini saya minta progres kinerja Bappebti dari perdagangan non SPA (sistem perdagangan alternatif)," tandas Nasril saat RDP di ruang rapat Komisi VI, Senin (11/4) petang.

Nasril, anggota dewan dari dapil Sumatera Utara III ini, menilai selama ini belum ada peningkatan kinerja dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini. Padahal selama kurun waktu empat bulan Komisi VI DPR telah melakukan rapat bersama Bappebti sebanyak tiga kali, hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga di bawah



Anggota Komisi VI Nasril Bahar

naungan Kementerian Perdagangan ini. "Mau dikemanakan Bappebti ini?" tanya Nasril.

Meskipun Kepala Bappebti, Bahrul Chairi menyanggah kritik tersebut dengan argumennya, namun tetap saja Nasril yang mengaku pernah berkecimpung dalam lembaga Bappebti selama delapan tahun, belum lega dengan kinerja jajaran lembaga

itu. "Kita tidak melihat progres dari komoditi," ujar Nasril, menampilkan argumen Kepala Bappebti.

Sebelumnya Bahrul menjelaskan, peranan Bappebti sebagai sarana pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Bappebti juga menyampaikan dalam rapat tersebut, telah meningkatkan pembenahan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang sistem perdagangan alternatif.

Bappebti juga mendeskripsikan, bahwa lembaganya telah menetapkan kebijakan berupa moratorium perizinan sistem perdagangan alternatif. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Kepala Bappebti Nomor 32/Bappebti/SE/03/2016 tanggal 14 Maret 2016. ■

(eko.mpl, foto : jk/hr)

Menhub Diminta Evaluasi Bandara Halim Untuk Penerbangan Sipil

Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinannya atas insiden Pesawat Batik Air dan TransNusa di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma pada Senin 4 April 2016, di tengah upaya penerbangan nasional Indonesia untuk dapat masuk pada kategori 1 standar keselamatan dan keamanan penerbangan dari Federal Aviation Administration (FAA),

Komisi V yang membidangi Perhubungan ini, merekomendasikan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi dan kajian yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma untuk penerbangan sipil, selambatnya-lambatnya 6 bulan.

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR yang dipimpin Ketua Fary Djemy Francis, dengan Menteri Perhubungan Senin (11/4) di Jakarta, membahas insiden kecelakaan penerbangan yang terjadi di Indonesia.

Menurut Anggota Komisi V Moh Nizar



Suasana Rapat Komisi V dengan Menhub

Zahro kecelakaan pesawat yang terjadi di bandara Halim Perdana Kusuma, dikarenakan kondisi bandara yang tidak layak untuk melayani penerbangan sipil, dengan tidak ada *taxi way*, *run way* kecil, dan apron sempit.

Nizar Zahro menilai Pemerintah kurang mengantisipasi laju pertumbuhan penumpang pesawat yang naik 15% setiap tahunnya, sedangkan sarana dan prasarana yang dibangun untuk penerbangan sipil sangat minim.

" Karena ketidaklayakan membangun

sarana dan prasarana, Bandara Halim yang diutamakan penggunaannya untuk penerbangan militer, juga dimanfaatkan penerbangan sipil, akhirnya yang dikhawatirkan terjadi kecelakaan tersebut," katanya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menyarankan mengembalikan fungsi Bandara Halim Perdana Kusuma khusus untuk penerbangan militer, pelayanan terhadap tamu Negara dan VVIP.

"Saran saya kembalikan Bandara Halim kepada militer yaitu TNI AU agar bisa menjaga wilayah NKRI, sementara optimalkan Pembangunan Soetta," tegasnya.

Dia menyadari Pemerintah belum bisa membuat sarana dan prasarana yang optimal untuk penerbangan sipil di Bandara Halim Perdana Kusuma. Selain itu, bisa juga dilakukan bangun bandara di lokasi baru, seperti Pondok Cabe atau di wilayah Karawang, asalkan memenuhi syarat sesuai dengan UU no.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. ■

(asi, foto : kresno/hr)



Dewan Apresiasi Wisata Religi di Pasuruan



Tim Kunspek Komisi X mengunjungi Wisata Religi Pasuruan.

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Pasuruan dan Kabupaten Banyuwangi Noor Achmad mengapresiasi wisata religi di Kota Pasuruan. Wisata religi ziarah ke makam KH. Abdul Hamid merupakan wisata andalan Pemerintah Kota Pasuruan.

"Wisata religi itu harus bersih, karena di beberapa tempat wisata religi biasanya dipenuhi oleh peminta-minta, alhamdulillah di sini tidak ada. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi wisata religi di Pasuruan ini," kata Noor Achmad saat pertemuan Tim

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wisata yang saat ini dikembangkan di Indonesia, dimana biasanya dikaitkan dengan kehalalan.

"Oleh karena itu kami mengusulkan kepada PHRI untuk mempromosikan wisata halal, restoran halal, hotel halal dan sebagainya. Mungkin dengan itu, akan banyak orang yang datang ke Pasuruan," paparnya.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini jika kita mengikuti wisata-wisata religi tentang seseorang, di

Komisi X DPR dengan Sekda Kota Pasuruan Bahrul Ulum, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pasuruan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan pemangku wisata di Kota Pasuruan, Jumat (8/4)

Menurut politisi Partai Golkar ini, wisata religi

situ tidak banyak yang memberikan informasi tentang orang yang dimakamkan.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan segera mungkin membuat sebuah buku yang dicetak resmi yang menjelaskan KH Abdul Hamid itu, sehingga siapa saja yang datang bisa membaca riwayat hidup KH Abdul Hamid. Mungkin bisa berhubungan dengan Gus Idris, karena pewaris sekarang ini adalah beliau," terang politisi dari Dapil Jawa Tengah VII ini.

Sebagai yang mengelola dua tempat wisata religi, dalam kesempatan tersebut ia berbagi pengalaman. Menurutnya, Masjid Agung Jawa Tengah dalam seminggu dikunjungi lebih dari seribu orang dan seringkali mengadakan acara-acara tingkat nasional ataupun internasional. Ia mengusulkan kalau memungkinkan di Pasuruan pun dilakukan hal yang demikian.

"KH Abdul Hamid kalau biografinya dikupas tidak akan habis-habis, maka dari itu jika setiap tahun diadakan insya Allah akan begitu banyak yang akan datang ke sini baik untuk jiarah maupun untuk mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut," mantapnya. ■

(sc) foto: sc/hr

Pemerintah Harus Berupaya Lebih Keras Serap Pajak

Pemerintah dinilai masih terseok-seok dalam menyerap penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya, pajak cukai rokok yang sudah diborong oleh industri rokok sebelum terjadi kenaikan cukai rokok pada Januari lalu. Upaya lebih keras harus dilakukan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Senin (11/4). Capaian penerimaan pajak dinilai belum optimal dibanding periode yang sama pada tahun lalu. "Saya kira

pemerintah perlu konsen bagaimana penerimaan perpajakan itu harus dilakukan dengan upaya-upaya yang keras."

Persoalan perpajakan menjadi isu krusial dalam rapat dengan Menkeu tersebut. Apalagi, isu ini dibarengi dengan kampanye pemerintah untuk



Ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit



Sekjen DPR RI Lantik Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

Pergantian pejabat di sebuah instansi adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam sebuah instansi, termasuk dalam tubuh Sekretariat Jenderal DPR RI. Setelah melalui proses seleksi secara terbuka, tidak hanya untuk internal Setjen DPR RI namun juga pegawai negeri yang ada di instansi lain, akhirnya Jumat (8/4) Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti Swasanani resmi melantik Suratna sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI yang baru.

"Kesetjenan DPR RI telah mengalami restrukturisasi organisasi, dan di dalam Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara) dikatakan bahwa untuk melakukan pengangkatan pejabat setingkat biro harus dilakukan secara terbuka. Terbuka disini tidak hanya untuk internal Setjen DPR saja, melainkan juga pegawai negeri yang berada di instansi lain," ujar Win, begitu ia biasa disapa.

Dijelaskannya, usai menjalani pengumuman terbuka melalui website resmi DPR, peserta harus menjalani proses seleksi yang dilakukan oleh Pansel (Panitia Seleksi), baru kemudian dilakukan wawancara dan test oleh pihak ketiga yang

menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Saat yang sama ada skandal perpajakan yang melibatkan para pengusaha Indonesia dalam dokumen yang disebut "Panama Papers". Komisi XI DPR juga sudah diserahkan mandat untuk membahas RUU Pengampunan Pajak pada masa sidang ini.

Isu pajak begitu seksi dan mencuri perhatian publik yang sangat luas. Dalam rapat tersebut juga terungkap ada sekitar 2000 wajib pajak asing lewat penanaman modal asing (PMA) yang tidak membayar pajak. Ini menjadi temuan menarik. Isu ini, kata Supit, bisa menjadi goncangan pula di dunia perpajakan. "Oleh karena itu, memang, harus ada wajib pajak PMA yang bisa ditarik pajaknya pada tahun ini. Kalau



Prosesi pelantikan Suratna sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

notabene bukan berasal dari tubuh kesetjenan DPR sendiri. Dengan demikian hasil yang muncul merupakan murni berdasarkan test dan seleksi lainnya yang tidak bisa diintervensi.

"Setelah serangkaian proses itu dilakukan, hasil seleksi juga harus dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Itulah kenapa pelantikan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi ini sebuah pengangkatan dari pejabat eselon tiga, ke tingkat biro," jelas Win.

Dengan terisinya jabatan Kepala Biro

tidak, ini menjadi isu yang tidak konstruktif buat teman-teman wajib pajak."

Politisi Partai Golkar itu juga menambahkan, kampanye pengampunan pajak yang diprogramkan pemerintah harus berkeadilan. Pasalnya, dalam rencana pengampunan pajak tersebut, pemerintah seakan ingin memberi "karpet merah" bagi para pengemplang pajak. Sementara para wajib pajak yang selama ini membayar pajak dengan baik, kurang mendapat apresiasi. Mana keberpihakan pemerintah kepada mereka yang membayar pajak dengan baik. Sementara yang ngemplang pajak akan diampuni," tandas Supit. ■

(mh) foto: jk/hr.

Pemberitaan Parlemen di Setjen DPR, Win berharap unit kerja tersebut harus lebih baik kinerjanya. Meskipun disadarinya, tugas tersebut tidak mudah, sehingga harus mampu bersinergi dengan unit kerja yang lain serta dapat memberikan dukungan secara optimal kepada dewan.

"Karena di biro ini juga banyak sekali PTT (Pegawai Tidak Tetap) baik yang ada di Bagian TV Parlemen maupun Bagian Media Cetak dan Media Sosial, maka saya berharap kepala biro yang baru harus mampu mengkompilasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya," harap Win.

Sementara itu Kepala Biro Pemberitaan Parlemen yang baru saja dilantik, Suratna mengatakan ia berupaya akan terus meningkatkan kinerja seluruh unit kerja yang dipimpinnya, sehingga dukungan terhadap dewan pun dapat lebih optimal. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI ini menyadari untuk bisa mewujudkan itu semua perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

Selain pelantikan Suratna sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, pada kesempatan itu Sekjen DPR RI juga mengukuhkan kembali Anak Agung Anom Semara sebagai Kepala Sub Bagian TU Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. ■

(Ayu), foto: jay/hr.

PIA DPR Gelar Pengajian Rutin

Baik buruk dan kesuksesan seorang anak terletak di tangan seorang ibu. Atas dasar itulah Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI mengambil tema Kemuliaan seorang ibu menjadi inspirasi bagi perkembangan anak menuju masa depan dalam pengajian rutusnya yang digelar di Masjid Baiturrahman, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/4).

"Ini merupakan pengajian rutin PIA yang sudah digelar sebanyak tiga kali. Kami sengaja mengangkat tema tentang kemuliaan seorang ibu menjadi inspirasi bagi perkembangan anak, tujuannya tak lain untuk memacu kami anggota PIA dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Tentunya tidak hanya pendidikan formal semata,



PIA menggelar pengajian di Masjid Baiturrahman

melainkan juga pendidikan agama. Karena bisa dikatakan kesuksesan dan baik buruknya seorang anak ada di tangan ibu. Bahkan begitupun dengan kesuksesan seorang suami, pasti ada seorang ibu atau wanita dibelakangnya," papar Nany Hasrul Azwar selaku Ketua Panitia Pengajian kali itu.

Ditambahkan Nany, hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa tidak sedikit program PIA yang bertujuan positif untuk bekal dan pengembangan diri anggota PIA itu sendiri dalam kehidupan berkeluarga. Maupun kegiatan sosial PIA lainnya di masyarakat. Oleh karena itu ia berharap media juga dapat berimbang dalam melakukan pemberitaan tentang PIA.

Dalam acara yang menampilkan ustad Oma Rahmad Rasyid sebagai penceramah itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua PIA, Ista Agus Hermanto. Ista sangat mengapresiasi penyelenggaraan pengajian PIA ini. Lebih lanjut ia berharap agar acara ini dapat terus terlaksana secara rutin, dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para anggota PIA. ■

(mm), fotocopy/hr.

Pembahasan RUU Kebudayaan Akan Libatkan Pihak-pihak Berkepentingan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) akan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan kebudayaan. Sehingga, RUU ini menjadi milik bersama untuk ketahanan kebudayaan Indonesia.

Demikian ditekankannya usai menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, perwakilan Kementerian Agama, perwakilan

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan Menteri Agama, dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

"RUU Kebudayaan ini telah menjadi harapan besar dari masyarakat dan sudah sangat lama ditunggu oleh publik. Mengingat, sudah 35 tahun dibahas, tapi belum selesai. Sehingga ini perlu komitmen bersama agar RUU ini segera disahkan," harap Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan,

kata kunci dari RUU Kebudayaan adalah bagaimana pelestarian dan pemanfaatan dari kebudayaan Indonesia. Sehingga, kebudayaan Tanah Air tidak dihak milik negara lain. Sehingga harus ada payung hukum yang melindungi ketahanan kebudayaan Indonesia.

"Kita juga perlu mengembangkan kebudayaan yang ada. Ini kan dibutuhkan suatu pendanaan. Jika tidak ada payung hukumnya, Pemerintah akan sulit untuk hadir dari sisi pendanaan. Jadi agar Pemerintah dapat hadir di situ, harus ada UU nya," imbuh Sutan.

Rencananya, lanjut politisi asal dapil Jambi itu, RUU ini akan mengamanahkan dibentuknya Dewan Kebudayaan Nasional. Dewan ini nantinya terdiri dari praktisi, pelaku kebudayaan, dan semua *stakeholder* yang berkaitan dengan kebudayaan.



"Sehingga kedepannya, jika RUU ini sudah disahkan, Dewan dapat berbicara sebagai perwakilan dari pelaku kebudayaan, untuk menyampaikan berbagai hal tentang kebudayaan," harap politisi yang akrab dipanggil SAH itu.

Sementara itu sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menyampaikan, RUU Kebudayaan RUU ini telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, dan Prioritas Prolegnas 2015. RUU ini nantinya terdiri dari enam bab, dan 99 pasal.

"Pengelolaan kebudayaan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan berdasarkan prinsip hak



Pimpinan Komisi X menerima DIM RUU Kebudayaan dari pemerintah

berkebudayaan, kearifan lokal, kelestarian alam dan lingkungan hidup, koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antarpemangku kepentingan, jati diri bangsa, harmoni kehidupan, dan etika global tentang kebudayaan," jelas Riefky.

Politisi F-PD itu memastikan, RUU Kebudayaan tidak akan menekan atau

membatasi ekspresi kebudayaan. Untuk hak berkebudayaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah pun memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi maupun sosial.

"Diplomasi Budaya untuk meningkatkan citra budaya Indonesia di mata masyarakat internasional," imbuah politisi asal dapil Aceh itu.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, dengan adanya RUU ini, diharapkan dapat menjaga tradisi dan kebudayaan Indonesia.

Selain itu, peraturan perundangan ini juga tidak mengungkung kebudayaan.

"Perundangan ini harus memberi ruang yang unik. Di satu sisi harus menjaga tradisi, namun di satu sisi memberi ruang untuk berekspresi. Melalui UU ini, negara hadir," kata Mendikbud. ■

(sf) foto: azka/hr

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Utama (Irtama) DPR RI menggelar sosialisasi bertajuk *Wistleblowing System* (WBS) di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR. Sosialisasi ini sebagai pedoman sistem pelaporan pelanggaran WBS, tindak pidana korupsi di lingkungan kepegawaian lembaga kesetjanaan.

"Sosialisasi ini penting untuk temen-teman semua agar memahami, ini sebagai perubahan pada *mindset*, pola kerja dan budaya kerja. Perlu proses dan dimulai dengan menyiapkan regulasinya," ungkap

Sekjen dan Irtama DPR Sosialisasikan Wistleblowing System

Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti Swasanani, Rabu (13/4).

WBS, dalam sosialisasi ini didefinisikan sebagai, pengungkapan tindak pelanggaran aturan lembaga, yang dilakukan karyawan atau pimpinan. WBS juga merupakan perbuatan melanggar hukum, perbuatan tidak etis dan tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia.

Irtama Setyanta Nugraha menjelaskan, "setiap pelaporan pelanggaran wajib menyampaikan data dan informasi secara akurat. Pelanggaran-pelanggaran itu bisa berupa indikasi korupsi, seperti gratifikasi," tandas Toto begitu dia biasa disapa.

WBS bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekjen DPR. Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Selain itu juga meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada pelapor dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan Setjen DPR," imbuah Toto.

Toto mendeskripsikan, pelapor pelanggaran adalah karyawan dari internal lembaga kesetjanaan, namun tidak menutup kemungkinan pelapor dari pihak eksternal secara terbatas, seperti mitra kerja di luar, atau masyarakat yang memiliki hubungan. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti. ■

(eko,mp) foto:azka/hr



Sekjen DPR Winantuningtyastiti



Komisi X Apresiasi Daerah-daerah Yang Laksanakan UNBK

Komisi X DPR mengapresiasi daerah-daerah yang telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Berdasar pemantauan dan laporan saat mengunjungi SMP Negeri I, SMA Negeri I dan SMP Negeri IV Gresik, serta penjelasan guru-guru dan pejabat Kemendikbud Gresik dan Blitar, pelaksanaan UN Tingkat SMA/SMK berjalan lancar.

Ketua Tim Kunspek Spesifik Ferdiansyah (FPG) menyatakan, kunspek ke Gresik-Blitar, Jumat (8/4) momennya tepat karena UN SMA sedang berlangsung dan UN SMP akan berlangsung termasuk sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UN Berbasis Komputer (UNBK).

Berdasarkan laporan kepala sekolah dan dinas pendidikan, para murid sekarang tidak grogi lagi. Akibat UN tidak menjadi satu-satu faktor kelulusan, maka membuat siswa *happy* dan tidak tertekan sehingga mengerjakan soal dan lebih *enjoy*. "Alhamdulillah tidak ada masalah UN di Kabupaten Gresik dan kota Blitar," jelasnya.

Lebih jauh Ferdy mengatakan, UNBK tidak ada masalah artinya kalau terjadi kesulitan maka siswa yang bersangkutan tunjuk tangan lalu direspon oleh pengawas atau panitia, tidak lama diselesaikan dan petunjuknya jelas. UNBK bukan dalam konteks UN *On Line* tapi UN berdasar *local*

area network (LAN) artinya soal dikirim dari pusat dengan kode tertentu pada jam tertentu baru bisa dibuka, baru siswa bisa mengerjakan, dimana soal UN sudah ditampung di server.

Menjawab pertanyaan pers sejauh mana pantauan Komisi X bahwa UNBK membawa misi kejujuran, politisi Golkar dari Dapil Jabar XI ini mengatakan, berdasarkan laporan maka relatif bisa dijamin. Identik dengan variasi satu kelas berbeda-beda, memperkecil peluang untuk berbuat kecurangan termasuk meniadakan joki atau menyontek. satu kelas saja soalnya beda-beda.

Dari dialog dengan kalangan pendidikan pendidikan Gresik dan Blitar terungkap, harapan besar agar UNBK bisa dilakukan serentak dan ada target waktu.



Tim Kunspek Komisi X DPR meninjau pelaksanaan UNBK di Gresik

UNBK dinilai membawa beberapa hal positif, lebih jujur, transparan dan sederhana. UNBK juga salah cara bagi para siswa menghadapi kemajuan teknologi serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Sementara anggota Tim Kunspek Komisi X DPR Mujib Rohmat berharap UNBK perlu dipersiapkan lebih baik, terutama bagi daerah-daerah yang listriknya masih bergiliran. Bahkan kalau perlu dibuat Satgas terkait penyediaan listrik, IT dan Telkom. Tak kalah penting, penyelenggaraan UNBK ini menjadi tekad bersama khususnya ada kesinambungan dengan pemerintah berikutnya.

"Program ini jangan sampai terputus, nanti ganti menteri jangan ganti kebijakan. Akibatnya kebijakan antar daerah tidak sama *plentang-plentong*, ini yang tidak kita kehendaki," tutur Mujib.

Tim Kunspek Komisi X terdiri Ferdiansyah (FPG) selaku Ketua Tim dengan anggota Wiryanti Sukamdani, Esti Wijayanti, Isma Yatun dan Guruh Irianto Sukarno Putro (FPDIP), Mujib Rohmat (FPG), Dwita Ria Gunadi, Sri Meliyana dan Nuroji (F.Gerindra), Laila Istiana (FPAN), Dedi Wahidi dan Zainul Arifin Noor (FPKB) dan Surahman Hidayat (FPKS). ■

(mp).foto : mp/hr

Revisi UU Pilkada Soroti Politik Uang

Komisi II DPR RI menyoroti fenomena politik uang dalam revisi UU Pilkada yang akan dibahas dalam masa sidang tahun 2015/2016 ini. Hal ini juga yang menjadi perdebatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II dengan Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga), Yolanda Pandjaitan (Peneliti Puskapol UI) dan Titi Anggraini (Perludem) di Gedung DPR, Senayan, Jumat (08/04).

Anggota Komisi II Sareh Wiyono

mengatakan, pendapatnya tentang politik uang. Menurutnya fenomena politik uang bisa dicegah dengan memberikan uang saku bagi pemilih yang datang ke TPS, mengingat dalam masyarakat perdesaan seringkali sulit untuk berangkat ke TPS. Sederhananya, lebih baik masyarakat pergi ke sawah menyelesaikan pekerjaannya dari pada ke TPS

"Tentang masalah politik uang, terus terang tidak bisa dihindari. Karena kadang masyarakat daerah itu jika tidak dikasih

uang saku, mereka tidak akan berangkat ke TPS. Lebih baik dia bekerja ke sawah daripada memilih calon pemimpin," ujar Sareh.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar masyarakat yang datang ke TPS diberikan insentif dari anggaran yang digunakan untuk membuat iklan yang besar. Menurutnya iklan yang besar juga kadang tidak banyak dilihat oleh masyarakat.

"Jika KPU membuat iklan besar, kadang



juga tidak dilihat. Saya usul seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan uang iklan yang besar kepada KPU untuk satu daerah misalnya antara Tangerang Selatan dan Kota Tangerang," papar Anggota DPR dapil Jawa Timur VIII ini.

"Bagaimana jika anggaran APBN/APBD yang digunakan untuk membuat iklan itu diberikan saja kepada pemilih, jadi misalnya satu orang datang untuk memilih kasih saja 20 ribu lalu terserah siapa yang dipilih, jadi uang iklan itu tidak ada. Sehingga jika ada calon yg menggunakan uang itu bisa dipidanakan," sambung-



Anggota Komisi II DPR Sareh Wiyono

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II Fraksi Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyampaikan ketidakesetujuannya atas usul tersebut. Menurutnya, jika KPU memberikan uang bagi pemilih itu sama saja dengan membodohi rakyat.

"Saya kurang sependapat, karena jika kita memberikan uang kepada rakyat itu sama saja membodohi. Jadi jika ada pra-pilkada maka perlu disosialisasikan bahwa ini calon pemimpin yang harus masyarakat pilih," ujar Rufinus.

Selain itu, Anggota DPR dapil Sumatera Utara II ini juga menyoroti minimnya partisipasi pemilih di pilkada serentak yang tak mencapai 50%. Menurutnya hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

"Saya yakin bahwa kegagalan dari pilkada yang hanya mencapai 30% partisipasi pemilih adalah *human error*. Disini bukan bicara parpol pengusung, jadi menurut saya sosialisasi dari KPU yang gagal," sambung-

Tak hanya politik uang yang disoroti, hal lain seperti adanya calon kepala daerah yang juga mantan narapidana juga menjadi topik yang diperdebatkan. Bagi Rufinus, bagi mantan terpidana harus ada *equal treatment* dan harus ada persyaratan khusus.

"Masalah *timeline*, khusus kepada terpidana harus ada *equal treatment*, tetapi seseorang yang masuk dalam proses pilkada yang terkategori *serious crime* itu harus ada persyaratan khusus," jelasnya.

Selain itu Rafinus juga menyayangkan masih adanya pegawai negeri yang bekerja di Bawaslu. Menurutnya itu menjadi ambiguitas karena bagaimana bisa seorang pegawai negeri yang harus tunduk pada UU Kepegawaian tetapi harus tunduk juga pada UU KPU. Menurutnya posisi ini harus segera diperjelas.

"Sampai saat ini masih ada pegawai negeri di Bawaslu, bagaimana bisa pegawai negeri harus tunduk pada UU Kepegawaian tapi juga tunduk pada UU KPU. Ini harus segera diperjelas dalam proses revisi ini," pungkasnya. ■

(hs,mp), foto: od/hr

Menkumham Harus Serius Atasi Peredaran Narkoba di Lapas

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry menilai lembaga pemasyarakatan (Lapas) kerap dijadikan sumber penghidupan bagi bandar Narkoba dan oknum sipir. Menkumham harus serius atasi itu. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly beserta jajarannya, Senin (11/4) di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.

"Lapas jadi tempat cari makan sumber penghidupan bagi bandar narkoba dan sipir. Apapun dibikin terobosan, pasang kamera kemudian kamera dirusak. Bahkan kerusakan yang terjadi bukan tidak mungkin otaknya juga dari sipir penjara yang ikut bermain, untuk melindungi bisnisnya. Bicara tentang remisi, ada banyak bandar narkoba yang ada dalam penjara, kalau perlu mereka tidak mau keluar dari penjara. Lapas itu dijadikan tembok perlindungan, dijadikan alibi semata padahal bisnisnya jalan terus. Justru dia



Anggota Komisi III DPR RI Herman Herry

lebih aman kalau berada di dalam lapas,"ungkap Herry.

Oleh karena itu lanjut Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, butuh sebuah terobosan dari Menkumham beserta jajarannya untuk membuat sebuah terobosan-terobosan yang signifikan. Terobosan itu berasal dari niat dan kemauan untuk memperbaiki sistem yang ada.

Senada dengan Hery, anggota Komisi III lainnya, Taufiqulhadi mengatakan sudah seharusnya Menkumham memberi perhatian serius terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas. Saat ini Indonesia memang sudah dalam status darurat narkoba, tidak terkecuali di dalam Lapas. Bagi para napi kasus Narkoba Lapas menjadi tempat yang aman untuk melakukan praktek haram narkoba, bahkan malah dijadikan tempat mengembangkan jaringan mereka.

"Rasa aman yang dirasakan pengedar narkoba tidak terlepas dari peran oknum internal petugas lapas itu sendiri. Disini saya ingin mengingatkan bahwa hukuman bagi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Mengapa hukuman itu juga tidak diberikan kepada oknum yang terbukti ikut terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas. Kalau memang ada oknum Lapas, sekalipun itu Kalapas (kepala Lapas) yang terlibat maka tetap harus diberi sanksi," tegas Politisi dari Fraksi Nasdem itu. ■

(Ayu), foto: and/hr



Komisi IV Desak Hentikan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Komisi IV bersepakat untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta, dan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku," ujar Herman Khaeron saat memimpin Raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Sebanyak 21 ribu nelayan terancam kehilangan pekerjaan, belum lagi masalah sosial ekonomi dan masalah amdal yang ditimbulkan bila rencana proyek reklamasi



Suasana Raker Komisi IV DPR RI dengan Kementerian LHK dan KKP

pantai ini tetap dilaksanakan. Relokasi tempat tinggal yang jauh dari kehidupan mereka sebagai nelayan, tentu akan mematikan mata pencaharian dan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan.

Komisi IV juga akan menindaklanjuti terhadap proses reklamasi pantai di seluruh Indonesia, terutama kawasan

strategis nasional, termasuk proses pembangunan reklamasi Teluk Benoa dalam panitia kerja Nelayan dan Pencemaran Laut.

"Kita akan mendalami dan mengkaji secara seksama berkaitan dengan proses pembangunan proyek reklamasi pantai teluk Jakarta, meskipun hari ini tidak bisa ditentukan salah atau benar, tapi tentu ini adalah amanat rapat yang harus dikaji sehingga ada keputusan yang pasti," tandas Herman.

Wakil Ketua Komisi IV, Viva Yoga Mauladi juga mengatakan bahwa untuk semua masalah yang berkaitan dengan reklamasi ini, supaya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab masalah reklamasi ini rawan dengan unsur korupsi di dalamnya. ■

(dep.mp) Foto: od/hr

Komisi VI Pertanyakan Realisasi dan Efektifitas Anggaran BKPM



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana

Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna membahas realisasi anggaran triwulan I tahun 2016 yang dialokasikan pada lembaga ini. Rapat ini dipimpin oleh Wakil

Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana.

Komisi VI mempertanyakan, terkait realisasi penyerapan anggaran triwulan I dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan mutakhir ini. "Mohon diberikan data dan jelaskan mengenai realisasi penyerapan anggaran," pinta Politisi dari Fraksi Partai Demokrat, Azam Azman Natawijana, Selasa (12/4).

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, anggaran lembaga yang dia pimpin pada tahun 2016, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI sebesar Rp. 520.901.324.000,. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret

2016 adalah sebesar Rp. 60.946.398.320,- atau mencapai 11,70 persen dari total anggaran BKPM tahun ini.

Pimpinan Komisi VI dari Dapil Jawa Timur III, juga mempertanyakan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tersebut. "Harap diberikan penjelasan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKPM," ujar dia.

Ketua BKPM menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilakukan yakni, peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan anggaran melalui peningkatan kualitas SDM. "Meningkatkan koordinasi antara pengelola anggaran dengan unit kerja terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan," papar Franky. ■

(eko.mp) foto: jk/hr

Revisi UU ITE Ditargetkan Selesai Juni

Komisi I DPR menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selesai pada Juni 2016 atau di Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2015-2016. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Rabu, (13/04).

"Pada 30 Mei 2016 RUU revisi UU ITE sudah final dan awal Juni dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU lalu diserahkan pada pemerintah," ujar TB. Hasanudin.

Menurutnya, Raker dengan Kominfo dan Kemenkumham ini adalah rapat kedua dalam membahas revisi UU ITE, yang sebelumnya dilakukan pada 14 Maret lalu. "Pada Raker 14 Maret lalu diagendakan beberapa hal, penjelasan pemerintah, pandangan fraksi-fraksi dan semua sepakat Komisi I DPR dan pemerintah membentuk Panitia Kerja revisi UU ITE yang bertugas materi RUU yang ditugaskan Raker," jelasnya.

DPR memasuki reses pada 30 April 2016 sehingga akhir sidang adalah tanggal 29 April. Oleh karenanya masih ada satu kali Raker dalam pembahasan revisi UU ITE ini. Selain itu dalam pembahasan revisi UU ITE pada Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2015-2016 dilakukan pada 17 Mei 2016 dan 23 Mei dilakukan rapat Panja. "Lalu kalau sepakat maka diserahkan pada tim perumus maka rapat tim perumus dan sinkronisasi pada 24 Mei 2016 lalu siang dibawa ke Panja," sambungnya.

Satu pekan kemudian, kata TB Hasanudin, akan dilakukan Raker dengan pemerintah lalu laporan Panja serta pendapat akhir fraksi dan pendapat pemerintah yang diakhiri dengan pengambilan keputusan. Menurut dia, pada 30 Mei 2015, RUU revisi UU ITE

sudah final dan awal Juni 2016 dibawa ke Rapat Paripurna.

Saat ini dari 62 Daftar Inventaris Masalah (DIM) di Revisi UU ITE, 12 sudah disepakati dan 50 sisanya akan terus didalami sebelum masa sidang DPR berakhir pada 30 April. "Tanggal 20 April dibahas di panja, setelah reses ada pembahasan lagi dua kali, baru masuk tahap komisi, kemudian pendapat akhir dari fraksi-fraksi terus ketok berupa *draft*, awal Juni molor-molornya pertengahan Juni, jadi akhir Juni diselesaikan," jelas TB Hasanudin.

Dari 50 DIM yang masih dalam pembahasan, salah satu fokus DPR dan Pemerintah yakni perubahan Pasal 27 ayat 3 UU ITE perihal penghinaan dan pencemaran nama baik. Menurutnya, pasal tersebut menjadi salah satu hal paling krusial dalam dunia *cyber*. "Yang soal pidana itu, masih tarik ulur, pidana 5 tahun apa dibawah 5 tahun, tangkap langsung atau bukti dulu," ujarnya.

Oleh karena itu, pembahasannya akan melibatkan para pakar di bidangnya masing-masing. "Maka nanti didiskusikan hasilnya seperti apa, juga pertimbangkan suara publik, dan melindungi HAM.

Penyalahgunaan ada konsekuensi, tapi kita juga melindungi kebebasan" paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan fokus yang dilakukan adalah mengubah pasal 27 ayat 3 guna mencegah adanya multitafsir dari ancaman pidana dari adanya pasal tersebut. "UU yang berlaku saat ini itu kan sudah 6 tahun, ketentuan pidana diatas lima tahun istilahnya kan ditahan lebih dulu baru dimintai keterangan, agar menghilangkan multi tafsir dari pasal ini, kita turunkan menjadi di bawah lima atau 4 tahun," ujar Rudiantara.

Sehingga jika ancaman pidana dari pasal tersebut diubah, setidaknya pihak yang terkait tidak ditahan dahulu baru kemudian diperiksa penegak hukum. Selain itu, dalam perubahan pasal juga delik yang dipakai adalah delik aduan. "Jadi tunggu jika ada yang merasa dirugikan, yang bersangkutan melaporkan ke pihak berwajib. Sebelumnya itu kan delik umum jadi tanpa pengaduan pun bisa, makanya disesuaikan dengan KUHP," ujarnya. ■

(hs), foto: eno/hr.



Wakil Ketua Komisi I TB. HASANUDDIN



BERITA BERGAMBAR



Ketua DPR Ade Komarudin di dampingi sejumlah anggota BKSAP menerima Dubes Korsel Kamis (14/4), Foto : Runi/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Kunjungan Kehormatan Dubes Mongolia Shagdar Battsetseg membahas persiapan pertemuan Parlemen Asia-Eropa dan penyerahan cenderamata berupa keris. Kamis (14/4) Foto : Jay/hr.



Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Setjen DPR RI masa Bhakti 2014-2019 oleh Ketua Umum Dharma Wanita Pusat di Saksikan oleh Sekjen DPR, Kamis, (14/4) Foto : Eno/hr.

